

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

##### Dasar

##### 1.1. Kondisi umum

##### Hukum

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

##### Entitas dan

##### Rencana

##### Strategis

Sejarah berdirinya BPPP Medan dimulai pada tahun 1961 dengan nama Sekolah Perikanan Laut SPL Belawan, pada tahun 1962 berubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Belawan. Kemudian pada tahun 1972 SUPP Belawan berubah nama menjadi *Training Center Perikanan* (TC Perikanan) Belawan, dan pada tahun 1975 TC Perikanan Belawan dikembangkan dan dirubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Belawan. Pada tahun 1978 P3KP3 Belawan diganti nama dengan Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Belawan. Pada tahun 2001, Balai Keterampilan Penangkapan Ikan berubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan, terakhir pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Sebagai salah satu UPT bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, BPPP Medan bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini pembangunan sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan. Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan yaitu pro-poor (pengetasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian), dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

### 1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa BPPP Medan mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan Baban Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok BPPP Medan menyelenggarakan fungsi -fungsi yaitu :

1. Penyusunan Bahan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan;
2. Penyusunan Program dan Anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
3. Pelatihan Teknis dan manajerial di bidang perikanan;
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
5. Pemantaua keutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manejerial dibidang perikanan;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyulkuh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pelatihan dan Perikanan (BPPP) Medan, memiliki Pejabat Struktural yaitu :

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi
3. Kepala Seksi Pelatihan
4. Kepala Seksi Penyuluhan

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Persuratan, Perlengkapan dan urusan rumah tangga (Umum) serta pengelolaan sarana dan

prasarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub. Bagian Tata Usaha dibantu 3 (tiga) orang pelaksana antara lain :

1. Pelaksana Urusan Kepegawaian
2. Pelaksana Urusan Keuangan
3. Pelaksana Urusan Perlengkapan Rumah Tangga dan Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah konsep manusia sebagai subyek atau pelaku yang diharapkan memiliki ilmu dan bermartabat tinggi karena BPPP Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan unsur administrasi dan unsur teknis dengan baik. Dalam hal ini BPPP Medan didukung oleh pegawai sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, terdiri dari 50 (lima puluh) orang PNS dan 15 (Lima belas) orang Pegawai Kontrak dan Satpam. Jumlah Tenaga kerja yang proporsional yang dipetakan melalui Analisa Jabatan telah terwujud dalam komposisi jabatan saat ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 403/MENSJ/KP.431/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, maka Penyuluh Perikanan masuk ke Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Medan yang terdiri dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Daftar Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Dalam mendukung kinerja BPPP Medan, kualitatif SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi kediklatan. Tabel berikut ini merupakan gambaran Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPPP berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2. Kualitatif Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	Tenaga Kontrak	Penyuluh Perikanan	
1.	S2	3	-	8	11
2.	S1/D4	26	3	160	195
3.	D-III	5	1	34	41
4.	D-I	-	1	-	1
5.	SLTA	13	5	49	67
6.	SLTP	-	3	-	3
7.	SD	1	2	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>15</b>	<b>251</b>	<b>321</b>

Sampai dengan bulan Desember 2023, jumlah Penyuluh Perikanan berkurang menjadi 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) orang, hal ini dikarenakan adanya penyuluh perikanan yang memasuki masa pumabakti (Pensiun), penyuluh yang pindah dan penyuluh yang meninggal dunia.

### 2.2.2. Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring

Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring merupakan salah satu seksi yang ada pada struktur organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Adapun tugas Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan kebijakan
2. Penyusunan program dan anggaran
3. Pengelolaan kinerja
4. Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan,
5. Penyusunan Laporan

### 2.2.3. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan Aparatur
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan Non Aparatur/masyarakat
3. Membuat juknis pelaksanaan pelatihan

Pada tahun 2023 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan telah melaksanakan pelatihan baik bagi aparatur maupun non aparatur /masyarakat antara lain :

❖ Pelatihan bagi Aparatur

Pelatihan bagi Aparatur di BPPP Medan yaitu :

- ✓ Pelatihan Peningkatan Kinerja bagi Penyuluh Perikanan

❖ Pelatihan bagi masyarakat / Non Aparatur

Pelatihan bagi non Aparatur / masyarakat yaitu :

- a. Pelatihan Peningkatan Kinerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)
- b. Pelatihan Industrialisasi bidang penangkapan
- c. Pelatihan Industrialisasi bidang permesinan
- d. Pelatihan Industrialisasi bidang budidaya
- e. Pelatihan Industrialisasi bidang pengolahan

#### **2.2.4. Seksi Penyuluhan**

Pada tahun 2023 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan telah ditetapkan sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluh Perikanan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Jumlah Penyuluh Perikanan yang berada di Satminkal BPPP Medan adalah 25 8 orang yang berasal dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barnt, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **2.2.5. Kelompok Fungsional Widyaiswara dan Instruktur**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan memiliki kelompok jabatan fungsional yaitu Kelompok Fungsional Widyaiswara dan kelompok fungsional Instruktur.

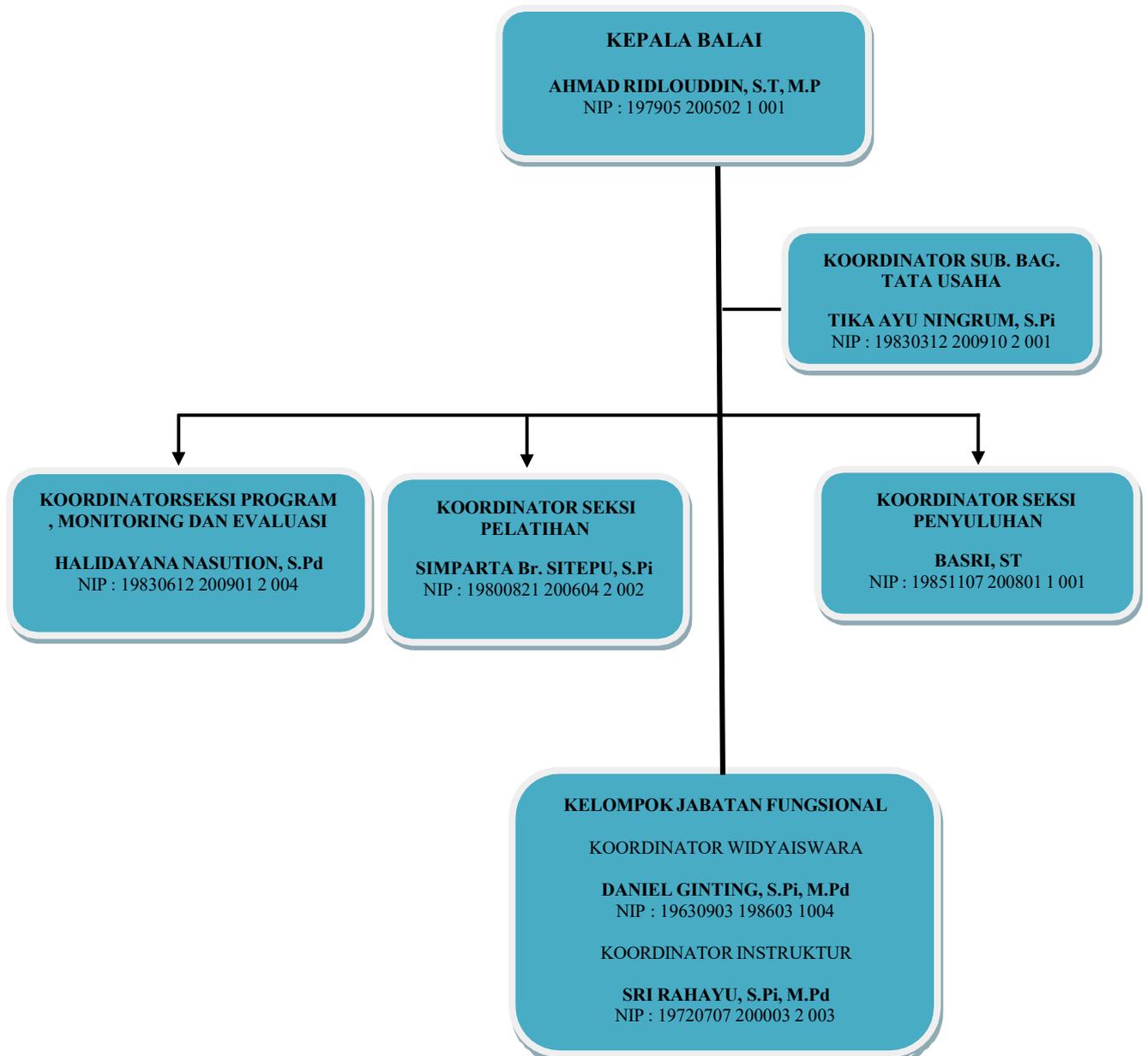
##### ***A. Widyaiswara BPPP Medan***

Widyaiswara BPPP Medan sampai dengan 30 Juni 2023 berjumlah 1 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Widyaiswara Madya,

##### ***B. Instruktur BPPP Medan***

Instruktur BPPP Medan pada tahun 2023 berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 2 (dua) orang Instruktur Madya, 5 (lima) orang Instruktur Muda, 3 (tiga) orang Instruktur Pertama, 1 (satu) orang Instruktur Penyelia dan 2 (dua) orang Instruktrur Pelaksana Lanjutan.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN**  
**BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR : 27/PERMEN-KP/2017, TANGGAL 27 MARET 2017**



Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BPPP Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

**VISI :**

Visi BRSDM mengacu pada Visi KKP adalah “Mewujudkan pengelolaan riset dan pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

**MISI :**

Misi BRSDM mengacu pada 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang **berdaulat**, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang **berkelanjutan** melalui pengelolaan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang **sejahtera** melalui pengelolaan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP.

Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka penunjang keberhasilan menuju kesuksesan, maka Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan menyusun visi yang mewujudkan jati diri dan fungsinya sebagai UPT Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

***“Menjadikan Balai sebagai lembaga diklat yang mampu meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan”***

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mengemban tugas untuk melakukan langkah-langkah pelatihan bagi SDM Perikanan secara terpadu dengan mengemban misi untuk :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat begai pelaku utama dan pelaku usaha
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil (PNS), swadaya, dan swasta
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019. Dengan demikian tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan laporan keuangan BPPP Medan adalah :

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Medan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Medan.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

### **2. SASARAN**

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2015-2019 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan- tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif yakni :

1. *Stakeholder Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Process Perspective*
4. *Learn And Growth Perspective*

### **3. REVISI DIPA**

Pada periode 30 Juni 2023 DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah diadakan direvisi sebanyak 5 kali :

- 1 Revisi DIPA 1 13 Februari 2023; pagu tetap 76.302.752.000,-
- 2 Revisi DIPA 2 14 April 2023; Pemutakhiran KPA POK pada (1) anggaran Percontohan Perikanan Budidaya, untuk memenuhi anggaran pada Gelar percontohan mini SFV di PENAS Petani Nelayan ke-16
- 3 Revisi DIPA 3 29 Mei 2023; Revisi Penambahan Pagu Rp70.990.000 untuk Pemanfaatan PNB
- 4 Revisi DIPA 4 31 Mei 2023; Revisi POK pada anggaran Percontohan Perikanan Budidaya dan Pelatihan Masyarakat KP
- 5 Revisi DIPA 5 05 Juli 2023; Revisi Perbaikan Rencana Penarikan Dana dan pergeseran detil belanja pegawai
- 6 Revisi DIPA 6 07 September 2023; Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada Belanja Operasional
- 7 Revisi DIPA 7 06 Oktober 2023; Revisi update halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK
- 8 Revisi DIPA 8 16 Oktober 2023; Revisi perubahan/pergeseran hal pagu tetap dan revisi pemenuhan belanja operasional
- 9 Revisi DIPA 9 30 Oktober 2023; Revisi DJA pergeseran belanja pegawai ke satker lain dan revisi pergeseran belanja percontohan KP
- 10 Revisi DIPA 10 06 November 2023; Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja BOP dan honor
- 11 Revisi DIPA 11 15 November 2023; Revisi pergeseran belanja pegawai untuk pemenuhan belanja operasional
- 12 Revisi DIPA 12 30 November 2023; Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja operasional
- 13 Revisi DIPA 13 08 Desember 2023; Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja operasional
- 14 Revisi DIPA 14 20 Desember 2023; Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja barang

### **4. JUMLAH SDM**

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebanyak 371 orang pegawai yang terdiri dari 311 orang pegawai negeri sipil dan 60 orang PPPK.

1. Eselon IV :1 orang
2. Eselon III :1 orang
3. Analisis Kepegawaian :1 orang
4. Pengelola PBJ :1 orang
5. APK APBN :3 org
6. Pranata Komputer :1 orang
7. Perencana :1 orang
8. Fungsional Umum :44 orang
9. Widyaiswara :1 orang

10. Instruktur	:14 orang
11. PPPK	:60 orang
12. Tenaga Penyuluh	:243 orang

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah)**;
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### Realisasi

#### Pendapatan Negara dan Hibah

Rp431.200,567,00

### B.1. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp431.200.567,00 atau mencapai 115,11% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp374.600.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan Budidaya, Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya, Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Sewa Workshop), Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Pengembalian Tunjangan Kinerja), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (Pengembalian Perjalanan Dinas Tahun 2022), Pendapatan Anggaran Lain-lain dan sudah mengacu pada PP Tarif PNBPN Nomor 47 Tahun 2023.

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp -	Rp 1.775.000,00	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp -	Rp 2.865.000,00	-
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 19.827.000,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi	Rp 33.800.000,00	Rp 92.330.000,00	<b>273,17</b>
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp340.800.000,00	Rp311.200.000,00	<b>91,31</b>
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	Rp 613.500,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	Rp 2.589.912,00	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	Rp 155,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>374.600.000</b>	<b>Rp431.200.567,00</b>	<b>115,11</b>

Penjelasan perbandingan Realisasi Pendapatan antara tahun berjalan dan tahun yang lalu dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp 1.775.000,00	Rp 1.350.000,00	31,48
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 2.865.000,00	-	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	Rp 4.590.000,00	-
Pendapatan dari Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi	Rp 92.330.000,00	Rp 41.410.000,00	122,97
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 19.827.000,00	Rp 900.000,00	2.103,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp 311.200.000,00	Rp 371.730.000,00	(16,28)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 613.500,00	Rp 371.157,00	65,29
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2.589.912,00	Rp 10.202.000,00	(74,61)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 155,00	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 431.200.567,00</b>	<b>Rp 430.553.157,00</b>	<b>0,15</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp431.200.567,00 dan Rp430.553.157,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Tahun 2023 naik sebesar 0,15% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Adapun terdapat PNBPN yang diperoleh dari Pelatihan BST bulan November Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp20.950.000,00 berupa Pendapatan Layanan pendidikan Rp14.400.000,00 dan Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi sebesar Rp6.550.000,00. Satker mencatat jurnal pengakuan PNBPN pada Bulan Desember tahun 2023 dan jurnal pengakuan piutang sebesar Rp20.950.000 yang diikuti dengan Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp104.750 (5/1000 dari Rp20.950.000).

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp73.900.209.933,00

## B.2. Belanja Negara

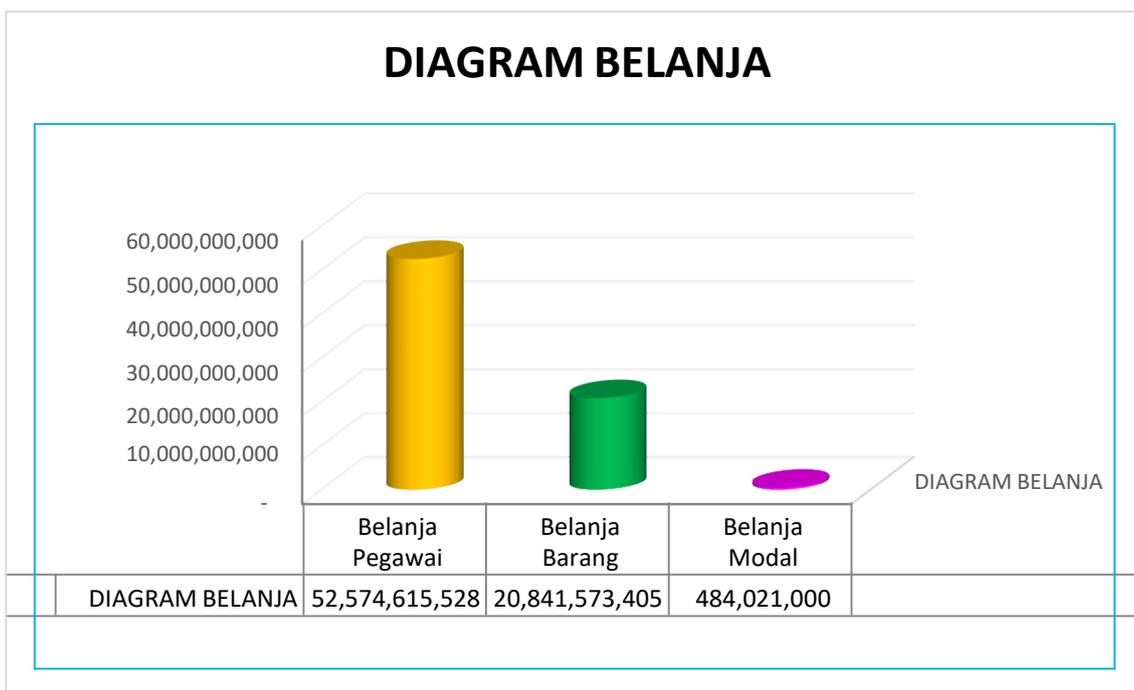
Realisasi belanja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp73.900.209.933,00 atau 98,96 persen dari anggaran senilai Rp74.673.942.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 53.338.502.000,00	Rp 52.574.615.528,00	98,57
Belanja Barang	Rp 20.850.440.000,00	Rp 20.841.573.405,00	99,96
Belanja Modal	Rp 485.000.000,00	Rp 484.021.000,00	99,80
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 74.673.942.000,00</b>	<b>Rp 73.900.209.933,00</b>	<b>98,96</b>

Realisasi belanja pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan (BPPP) pada periode 31 Desember 2023 sudah terserap dengan baik dan tidak ada kendala pada realisasi untuk Semester II Tahun 2023 ini.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2023 mengalami peningkatan senilai 5,86 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA. 2022.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kondisi Gedung dan Bangunan yang memerlukan pemeliharaan lebih dibandingkan tahun sebelumnya sehingga belanja barang untuk keperluan pemeliharaan Gedung dan bangunan meningkat
2. Penambahan belanja modal baik untuk keperluan peralatan dan mesin maupun keperluan gedung dan bangunan.
3. Bertambahnya jumlah masyarakat pelaku usaha perikanan yang akan dilatih sehingga menyebabkan kenaikan jumlah anggaran pada tahun 2023 secara Offline atau tatap muka.

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 52.574.615.528,00	Rp 52.499.163.819,00	0,14
Belanja Barang	Rp 20.841.573.405,00	Rp 17.227.114.346,00	20,98
Belanja Modal	Rp 484.021.000,00	Rp 80.364.000,00	502,29
Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 73.900.209.933,00</b>	<b>Rp 69.806.642.165,00</b>	<b>5,86</b>

Belanja Pegawai  
Rp52.574.615.528,00

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada TA. 2023 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK; serta Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp52.574.615.528,00 dan Rp52.499.163.819,00. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan senilai 0,14 persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah Pegawai dan Penyuluh non PNS (PPPK) Tahun 2023.

Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	30-Dec-23	30-Dec-22	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 23.476.436.509,00	Rp 24.712.880.743,00	(5,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 4.056.902.746,00	Rp 3.545.001.570,00	14,44
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Rp 25.041.276.777,00	Rp 24.244.779.899,00	3,29
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 52.574.616.032,00</b>	<b>Rp 52.502.662.212,00</b>	<b>0,14</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp 504,00	Rp 3.498.393,00	(99,99)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 52.574.615.528,00</b>	<b>Rp 52.499.163.819,00</b>	<b>0,14</b>

Belanja Barang  
Rp20.841.573.405,00

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp 20,841,573,405,00 dan Rp 17.227.114.346,00.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan senilai Rp3.614.459.059,00 atau 17,34 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan sehingga terjadi peningkatan dalam belanja barang operasional dan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan serta adanya kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang mana pada tahun sebelumnya selama pandemi dilaksanakan secara *online*, namun pada tahun 2023 sudah mulai kembali dilakukan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Tabel 10  
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30-Dec-23	30-Dec-22	Naik/(Turun)	%
Bel. Keperluan Perkantoran	Rp 696.061.215,00	Rp 525.615.971,00	Rp 170.445.244,00	100,00
Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 11.942.215,00	Rp 7.874.400,00	Rp 4.067.815,00	51,66
Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 199.296.000,00	Rp 169.752.000,00	Rp 29.544.000,00	17,40
Bel. Barang Operasional Lainnya	Rp 973.584.781,00	Rp 136.119.071,00	Rp 837.465.710,00	615,24
Bel. Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 17.907.001,00	Rp 11.756.250,00	Rp 6.150.751,00	52,32
Bel. Bahan	Rp 1.320.698.250,00	Rp 1.252.919.720,00	Rp 67.778.530,00	5,41
Bel. Honor Output Kegiatan	Rp 8.613.400.000,00	Rp 9.189.000.000,00	Rp (575.600.000,00)	-6,26
Bel. Barang Non Operasional Lainnya	Rp 2.466.530.547,00	Rp 2.349.734.762,00	Rp 116.795.785,00	4,97
Bel. Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 11.000.000,00	Rp (11.000.000,00)	-100,00
Bel. Peralatan Dan Mesin	Rp 250.186.470,00	Rp -		
Bel. Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 130.894.700,00	Rp 95.084.000,00	Rp 35.810.700,00	37,66
Bel. Langganan Listrik	Rp 321.296.803,00	Rp 265.506.500,00	Rp 55.790.303,00	21,01
Bel. Langganan Telepon	Rp 7.434.895,00	Rp 7.346.628,00	Rp 88.267,00	1,20
Bel. Langganan Air	Rp 161.078.384,00	Rp 60.856.445,00	Rp 100.221.939,00	164,69
Bel. Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp -	-
Bel. Sewa	Rp 196.040.000,00	Rp 66.975.000,00	Rp 129.065.000,00	192,71
Bel. Jasa Profesi	Rp 109.500.000,00	Rp 58.900.000,00	Rp 50.600.000,00	85,91
Bel. Jasa Lainnya	Rp 728.214.824,00	Rp 35.846.000,00	Rp 692.368.824,00	1.931,51
Bel. Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 5.419.000,00	Rp (5.419.000,00)	-100,00
Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 1.265.699.000,00	Rp 234.610.000,00	Rp 1.031.089.000,00	439,49
Bel. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 353.288.192,00	Rp 298.518.666,00	Rp 54.769.526,00	18,35
Bel. Pemeliharaan Jaringan	Rp 258.968.969,00	Rp 129.870.800,00	Rp 129.098.169,00	99,41
Bel. Perjalanan Biasa	Rp 1.852.191.159,00	Rp 1.398.509.133,00	Rp 453.682.026,00	32,44
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 643.050.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 639.550.000,00	100,00
Bel. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 204.310.000,00	Rp 852.400.000,00	Rp (648.090.000,00)	-76,03
Jumlah Belanja Bruto	Rp 20.841.573.405,00	Rp 17.227.114.346,00	Rp (3.614.459.059,00)	-17,34
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>Rp 20.841.573.405,00</b>	<b>Rp 17.227.114.346,00</b>	<b>Rp 3.614.459.059,00</b>	<b>17,34</b>

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 terdapat akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dengan realisasi senilai Rp17.907.001,00 dan Akun Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 dengan realisasi senilai Rp 0,00.

Tabel 11  
Belanja Dalam Rangka COVID-19

Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Progress Kegiatan (%)
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 17.910.000,00	Rp 17.907.001,00	99,98
Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 17.910.000,00</b>	<b>Rp 17.907.001,00</b>	<b>99,98</b>

Belanja Modal Tanah  
Rp0,00

### B.3. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 12, Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2023 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 12  
Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Sertifikat Tanah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### B.4. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp196.692.000,00 dan Rp80.364.000,00.

Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp196.692.000,00

Tabel 13  
Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Modal	Rp 197.000.000,00	Rp 196.692.000,00	99,84
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 197.000.000,00</b>	<b>Rp 196.692.000,00</b>	<b>99,84</b>

Berdasarkan Tabel 13, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2023 sudah terealisasi sebesar 99,84 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Tabel 14  
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 196.692.000,00	Rp 80.364.000,00	244,75
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 196.692.000,00</b>	<b>Rp 80.364.000,00</b>	<b>244,75</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 196.692.000,00</b>	<b>Rp 80.364.000,00</b>	<b>244,75</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 naik sebesar 244,75 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini karena adanya penambahan modal peralatan dan mesin dalam rangka pembinaan pelaku-pelaku usaha baru di BPPP Medan.

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp149.578.000,00

#### B.5. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp149,578,000,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 15, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2023 sudah terealisasi sebesar 99,72 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 15  
Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Modal	Rp 150.000.000,00	Rp 149.578.000,00	99,72
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 150.000.000,00</b>	<b>Rp 149.578.000,00</b>	

Tabel 16  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Gedung Tempat Kerja	Rp 149.578.000,00	Rp -	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 149.578.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 149.578.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>100,00</b>

Belanja Modal Jalan,  
Irigasi dan Jaringan  
Rp0,00.

#### B.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 17, Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2023 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 17  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Modal  
Lainnya Rp0,0

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak memiliki Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2023.

#### **B.7. Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak memiliki Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2023.

Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0,00

#### **B.8. Belanja Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak memiliki Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2023.

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31-Dec-23	30-Dec-22
1	Saldo UP	Rp -	Rp -
2	Saldo TUP	Rp -	Rp -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Kas di Bendahara  
Penerima Rp0,00

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0,00

### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19  
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp0,00

#### C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp 0,00 dan Rp33.531.500,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 20.

Tabel 20  
Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Piutang Bukan Pajak	Rp 0,00	Rp 33.700.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	Rp 0,00	Rp (168.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 33.531.500,00</b>

Adapun terdapat PNBPN yang diperoleh dari Pelatihan BST bulan November Tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp20.950.000,00 berupa Pendapatan Layanan pendidikan Rp14.400.000,00 dan Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi sebesar Rp6.550.000,00. Satker mencatat jurnal pengakuan PNBPN pada Bulan Desember tahun 2023 dan jurnal pengakuan piutang sebesar Rp20.950.000 yang diikuti dengan Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp104.750 (5/1000 dari Rp20.950.000). Namun karena tidak memenuhi syarat Untuk diakui sbg piutang, telah dilakukan jurnal koreksi pada periode 13 yang mengakibatkan saldo piutang dan penyisihan piutang tak tertagih menjadi 0,00 Mutasi piutang PNBPN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>Rp 33.531.500,00</b>
Mutasi tambah:	
Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetak Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2023	Rp 12.686.250,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 20.845.250,00</b>

Bag Lancar TGR Rp0,00

#### C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 21 adalah nihil.

Tabel 21  
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
1	NIHIL	-	-
2		0	0
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Sedangkan mutase Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2022	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2023	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp0,00 merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR jangka panjang sebagai Bagian Lancar di TA. 2023.
- Mutasi kurang senilai Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan  
Penjualan Angsuran Rp0,00

### C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Bag. Lancar  
TP/TGR Rp0,00

### C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00, senilai Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 22  
Rincian Penyisihan Piutang TakTertagih– Jangka Pendek

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
<b>Jumlah</b>				-

Belanja dibayar dimuka  
Rp0,00

### C.8. Belanja di Bayar Di Muka

Saldo Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/Jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel 23  
Rincian Belanja dibayar dimuka

No	Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
1	NIHIL	-	-
2		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Persediaan  
Rp1.484.500,00

### C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp1.484.500,00 dan Rp332.000,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24  
Rincian Persediaan

No	Persediaan	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Barang Konsumsi	Rp 836.500,00	Rp -
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -
3	Suku Cadang	Rp -	Rp -
4	Bahan Baku	Rp -	Rp -
5	Persediaan Lainnya	Rp648.000,00	Rp 332.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.484.500,00</b>	<b>Rp 332.000,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berupa Barang Konsumsi dan Persediaan Lainnya (obat-obatan).

Bagian Lancar TGR  
Rp0,00

### C.10.Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. TagihanTP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 25 adalah Nihil.

Tabel 25  
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
1	NIHIL	-	-
2		0	0
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Sedangkan mutase Tagihan TP/TGR adalahsebagai berikut:

<b>Saldo per 30 Juni 2023</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2022	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2022	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp0,00 merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR jangka panjang sebagai Bagian Lancar di 31 Desember 2023
- Mutasi kurang senilai Rp0,00.

Tagihan Penjualan

### C.11.Tagihan Penjualan Angsuran

Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0,00. dan Rp0,00.

Tanah

Rp23.070.382.448,00.

### C.12. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp23.070.382.448,00 dan Rp23.070.382.448,00.

Rincian saldo tanah per TA.2023 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	`001	1.800	1.527.836.448,00
2	`001	22.219	17.815.750.000,00
3	`002	3.925	2.905.776.000,00
4	`003	1.109	821.020.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.053</b>	<b>23.070.382.448,00</b>

Setelah pengukuran kembali tanah rumah negara golongan III oleh tim BPN pada tanggal 08 Januari 2024 di Jalan Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan, disimpulkan bahwa sisa tanah yang tercatat pada SIMAK BMN BPPP Medan yang semula sisanya tercatat seluas 779 m<sup>2</sup> mengalami perubahan menjadi seluas 569 m<sup>2</sup>, dimana 5 unit rumah tersebut sudah berstatus sewa beli dan telah lunas pembayarannya. Kemudian proses dilanjutkan dengan pemecahan sertifikat Tanah dan sisa tanah Rumah Negara tersebut akan diserahkan kepada PUPR atau instansi terkait yang merupakan Tanah Fasilitas Umum.

Peralatan dan Mesin

Rp19.620.222.635.

### C.13. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp19.620.222.635,00 dan Rp19.632.734.635,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp 19,632,734,635.00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian Peralatan dan Mesin	Rp 334,443,000.00
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Perolehan Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan (akm.penyesutan)	Rp 346,955,000.00
Penghapusan	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 19,620,222,635.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (19,016,935,922.00)
<b>Nilai Buku per 30 Desember 2023</b>	<b>Rp 603,286,713.00</b>

Ada penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin untuk TA. 2023 yaitu penambahan aset berupa pembelian peralatan dan mesin total senilai Rp334.443.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	Nilai
3010110001	Tower Crane	113.845.595,00
3010306999	Mesin Bor	7.528.829,00
3030101034	Mesin Laser Welding	6.979.279,00
3030205008	<i>Engine Stand</i>	9.397.297,00
3050204008	<i>Cold Storage</i>	196.692.000,00

serta pengurangan aset berupa penghentian aset dari penggunaan senilai Rp346.955.000,00 berupa penghapusan Mobil Latih Isuzu/NHR55 Tahun Perolehan 2011 dikarenakan rusak berat. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diajukan Surat Usulan Penghapusan BMN tanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat B.2108/BRSDM.BPPP-Mdn/TU.210/VIII/2023

Terdapat Reklasifikasi Aset pada Sub-Kelompok Barang berupa *Set Up Box* sebanyak 30 unit:

Kode Barang	Nama Barang	Nilai
3020105014	Alat Angkutan Bermotor	(17.066.250)
<b>Koreksi</b>		
3060310004	Antena ALL BAND	17.066.250

Gedung dan Bangunan  
Rp22.350.303.742,00.

#### C.14. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp22.350.303.742,00 dan Rp22.200.725.742,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp 22,200,725,742.00</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Aset	Rp 149,578,000.00
Transfer Masuk	
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	Rp -
Mutasi kurang:	
Reklas	-
Koreksi Pencatatan	
<b>Saldo per 31 Desemberr 2023</b>	<b>Rp 22,350,303,742.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (3,753,346,908.00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 18,596,956,834.00</b>

Ada penambahan Aset Gedung dan Bangunan untuk TA. 2023 yaitu penambahan aset berupa pengembangan nilai asset Gedung dan Bangunan senilai Rp 149.578.000,00.

Terdapat **Reklas pencatatan Barang Milik Negara dikarenakan kesalahan pencatatan kode barang** sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	Nilai
20101049999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	(149.578.000)
<i>Koreksi</i>		
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	149.578.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp5.480.462.700,00.

#### C.15 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.480.462.700,00 dan Rp5.480.462.700,00 tidak ada penambahan nilai aset pada jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2023.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp 5.480.462.700,00</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 5.480.462.700,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (3.422.392.471,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 2.058.070.229,00</b>

Tidak Ada transaksi penambahan pada Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp62.748.900,00.

### C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp62.748.900,00 dan Rp62.748.900,00. Tidak ada penambahan pada Tahun 2023 pada Aset Tetap Lainnya.

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp 62.748.900,00</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Reklasifikasi	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 62.748.900,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp -
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 62.748.900,00</b>

Aset Tetap Lainnya yaitu berupa monografi (Buku Perpustakaan) sebanyak 258 buah senilai Rp32.620.400,00 CD/VCD/DVD sebanyak 12 buah senilai Rp29.628.500,00 dan Peta sebanyak 1 buah senilai Rp500.000,00.

Konstruksi dalam  
Pengerjaan Rp0,00.

### C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(26.192.675.301,00).

### C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(26.192.675.301,00) dan Rp(25.319.664.315,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per TA. 2023 disajikan pada Tabel 24, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 26  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 19.620.222.635,00	Rp 19.016.935.922,00	Rp 603.286.713,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 22.350.303.742,00	Rp 3.753.346.908,00	Rp 18.596.956.834,00
3	Jalan dan Jembatan	Rp 3.484.405.050,00	Rp 2.701.411.788,00	Rp 782.993.262,00
4	Irigasi	Rp 1.115.877.000,00	Rp 468.493.333,00	Rp 647.383.667,00
5	Jaringan	Rp 880.180.650,00	Rp 252.487.350,00	Rp 627.693.300,00
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 62.748.900,00	Rp -	Rp 62.748.900,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 47.513.737.977,00</b>	<b>Rp 26.192.675.301,00</b>	<b>Rp 21.321.062.676,00</b>

Aset Tak Berwujud Rp0,00

### C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
	NIHIL	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp -</b>

Aset Lain-lain

Rp346.955.000,00.

**C.20. Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp346.955.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sudah dilakukan penghapusan oleh KPKNL dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: *(details on bmn report)*

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	346.955.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN		
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>346.955.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan	Rp	346.955.000,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Terdapat transaksi penambahan pengurangan aset lain-lain pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu berupa aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintah senilai **Rp346.955.000,00**, berupa **Mobil Latih Isuzu/NHR55** Tahun Perolehan 2011 dikarenakan rusak berat. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diajukan Surat Usulan Penghapusan BMN tanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor surat B.2108/BRSDM.BPPP-Mdn/TU.210/VIII/2023

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(Rp346.955.000,00)

**C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp346.955.000,00) dan Rp(0,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per TA.2023 sebagai berikut :

Tabel. 28  
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	Rp 346.955.000	Rp 346.955.000	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Total</b>		<b>Rp 346.955.000</b>	<b>Rp 346.955.000</b>	<b>Rp -</b>

**C.3 Piutang Jangka Panjang**

Tuntutan Perbendaharaan  
Rp0,00.

### C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29  
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
	NIHIL	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 01 Januari 2023</b>	<b>Rp0,00</b>
Mutasi tambah:	Rp0,00
- TGR	Rp0,00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp0,00</b>

Penyisihan Piutang tak  
Tertagih - Tuntutan  
Perbendaharaan Rp0,00

### C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30  
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
<b>Total</b>				-

Aset Lainnya  
Rp346.955.000,00

#### C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp346.955.000,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-Lain	Rp 346.955.000,00	Rp -
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 346.955.000,00</b>	<b>Rp -</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp (346.955.000,00)	Rp -
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Aset Tak Berwujud Rp0,00

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per TA.2023 disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	NIHIL	
2		
3		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp -</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00

### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang mukakerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak  
Ketiga Rp45.942.295,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp45,942,295,00 dan 31 Desember 2022 senilai Rp45.263.009,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 0,00	-
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp 45.942.295	-
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp -	-
<b>Total</b>		<b>Rp 45.942.295</b>	<b>-</b>

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada TA.2023 berupa belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp398.464.837,00 dengan rincian senilai Rp3.556.351,00 berupa pembayaran tunjangan bulan Mei yang sudah dibayarkan berdasarkan SPM Nomor 00423A tanggal 7 Juni 2023 namun masih tercatat pada hutang kepada pihak ketiga dan senilai Rp394.908.486,00 yang merupakan pembayaran tunjangan bulan Desember yang tercatat sebanyak 3 kali Rp197.454.243,00 pada aplikasi, namun SP2D hanya 1 kali pada FA Detail. Berdasarkan konsultasi dengan KPPN, hal tersebut dikarenakan kesalahan

sistem. Atas kejadian tersebut, telah dilakukan jurnal koreksi pada periode 14 untuk menghapus Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sehingga saldonya pada LK audited menjadi Rp0,00.

Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp45.942.295,00 berupa pembayaran Listrik Rp24.392.359,00, Air Rp15.939.484,00, Telfon Rp610.452, dan Internet Rp5.000.000,00 pada Bulan Desember Tahun 2023 yang telah dilakukan jurnal balik.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00.

### C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada Tabel 34

	nihil	

### C.26. EKUITAS

Ekuitas Rp44.367.937.329,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp44.367.937.329,00 dan Rp45.115.990.601,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP  
Rp431.200.567,00

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp431.200.567,00 dan Rp430.553.157,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 35  
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	Rp 1.775.000,00	Rp 1.350.000,00	31,48
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 2.865.000,00	-	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	Rp 4.590.000,00	-
Pendapatan dari Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi	Rp 92.330.000,00	Rp 41.410.000,00	122,97
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 19.827.000,00	Rp 900.000,00	2.103,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	Rp 311.200.000,00	Rp 371.730.000,00	(16,28)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 613.500,00	Rp 371.157,00	65,29
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2.589.912,00	Rp 10.202.000,00	(74,61)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 155,00	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp 431.200.567,00</b>	<b>Rp 430.553.157,00</b>	<b>0,15</b>

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) per periode Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) per periode Desember 2022. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) per periode Desember 2023 senilai Rp431.200.567,00 merupakan pendapatan dari pertanian, perkebunan dan peternakan, penjualan peralatan dan mesin yang sudah tidak terpakai, penjualan hasil produksi non litbang lainnya, penggunaan sarana seperti aula dan workshop pada pelatihan masyarakat maupun fungsional dan pelatihan dan pendidikan serta Upgrading skill pegawai.

Beban Pegawai  
Rp52.574.615.528,00

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp52.574.615.528,00 dan Rp52.499.163.819,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 36  
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 15.113.070.060,00	Rp 16.128.299.682,00	(6,29)
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 219.127,00	Rp 227.620,00	(3,73)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 1.151.298.212,00	Rp 1.188.310.522,00	(3,11)
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 402.588.038,00	Rp 419.794.592,00	(4,10)
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 17.640.000,00	Rp 18.360.000,00	(3,92)
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 3.143.662.000,00	Rp 3.094.317.500,00	1,59
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 65.389.288,00	Rp 61.173.754,00	6,89
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 936.680.280,00	Rp 974.338.680,00	(3,87)
Beban Uang Makan PNS	Rp 2.575.159.000,00	Rp 2.753.520.000,00	(6,48)
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 70.730.000,00	Rp 71.040.000,00	(0,44)
Beban Gaji Pokok PPPK	Rp 2.644.068.500,00	Rp 2.313.870.000,00	14,27
Beban Pembulatan Gaji PPPK	Rp 63.866,00	Rp 52.790,00	20,98
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	Rp 176.461.450,00	Rp 148.028.350,00	19,21
Beban Tunj. Anak PPPK	Rp 40.367.270,00	Rp 40.774.750,00	(1,00)
Beban Tunj. Fungsional PPPK	Rp 474.720.000,00	Rp 421.200.000,00	12,71
Beban Tunj. Beras PPPK	Rp 157.368.660,00	Rp 134.266.680,00	17,21
Beban Uang Makan PPPK	Rp 563.853.000,00	Rp 486.809.000,00	15,83
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 21.454.987.136,00	Rp 21.009.159.236,00	2,12
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	Rp 3.586.289.641,00	Rp 3.235.620.663,00	10,84
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 52.574.615.528,00</b>	<b>Rp 52.499.163.819,00</b>	<b>0,14</b>

Beban Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan TA. 2023 mengalami peningkatan sebanyak 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penambahan jumlah pegawai PPPK, namun terdapat pula pegawai PNS yang pensiun sehingga beban gaji tidak terlalu mengalami peningkatan yang berarti.

Beban Persediaan  
Rp130.390.200,00

### 3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp130.390.200,00 (*saldo on lo*) dan Rp101.570.800,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 (based nercobakrual)  
Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Persediaan	Rp 119.563.700,00	Rp 95.084.000,00	(20,47)
Konsumsi			
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp -	Rp 1.123.000,00	-
Beban Persediaan Lainnya	Rp 10.826.500,00	Rp 4.520.800,00	(58,24)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 130.390.200,00</b>	<b>Rp 100.727.800,00</b>	<b>(22,75)</b>

Bertambahnya kegiatan pelatihan dan penyuluhan pegawai di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan TA. 2023 berpengaruh terhadap beban persediaan terutama beban persediaan konsumsi yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,10 persen.

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp16.133.850.671,00

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp16.133.850.671,00 dan Rp14.193.280.615,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Pasca pandemi Covid-19, Balai pelatihan dan penyuluhan Perikanan Medan mulai aktif kembali dalam melakukan kegiatan operasional sesuai tugas pokok dan fungsinya, hal ini berpengaruh terhadap beban barang dan jasa yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,67 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Beban barang operasional lainnya dan beban jasa lainnya berpengaruh sangat signifikan dalam peningkatan beban dan jasa tahun 2023.

Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 38.  
Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 696.061.215,00	Rp 515.971.140,00	34,90
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 11.942.215,00	Rp 7.874.400,00	51,66
Beban Honor Op. Satuan Kerja	Rp 199.296.000,00	Rp 169.752.000,00	17,40
Beban Barang Op. Lainnya	Rp 973.584.781,00	Rp 136.119.071,00	615,24
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 17.907.001,00	Rp 11.756.250,00	52,32
Beban Bahan	Rp 1.320.698.250,00	Rp 1.262.478.551,00	4,61
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 8.613.400.000,00	Rp 9.189.000.000,00	(6,26)
Beban Barang Non Op. Lainnya	Rp 2.466.530.547,00	Rp 2.349.734.762,00	4,97
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 11.000.000,00	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp 250.186.470,00	Rp -	-
Beban Langganan Listrik	Rp 316.800.847,00	Rp 244.771.368,00	29,43
Beban Langganan Telepon	Rp 7.399.230,00	Rp 6.826.628,00	8,39
Beban Langganan Air	Rp 166.289.291,00	Rp 60.856.445,00	173,25
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	-
Beban Sewa	Rp 196.040.000,00	Rp 66.975.000,00	192,71
Beban Jasa Profesi	Rp 109.500.000,00	Rp 58.900.000,00	85,91
Beban Jasa Lainnya	Rp 728.214.824,00	Rp 35.846.000,00	1.931,51
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -	Rp 5.419.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 16.133.850.671,00</b>	<b>Rp 14.193.280.615,00</b>	<b>13,67</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp1.877.956.161,00

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.877.956.161,00 dan 662.999.466,00. Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ke kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 39  
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Ged dan Bangunan	Rp 1.265.699.000,00	Rp 234.610.000,00	439,49
Beban Pemeliharaan Perl dan Mesin	Rp 353.288.192,00	Rp 297.486.666,00	18,76
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 258.968.969,00	Rp 130.902.800,00	97,83
Pemeliharaan	Rp -	Rp -	-
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.877.956.161,00</b>	<b>Rp 662.999.466,00</b>	<b>183,25</b>

Beban Pemeliharaan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar 183,25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya dalam pemeliharaan gedung dan bangunan pasca pandemi COVID-19 tidak digunakan secara maksimal.

Beban Perjalanan Dinas  
Rp2.699.551.159,00

#### D.6 Beban Perjanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.699.551.159,00 dan Rp2.254.495.133,00. Beban tersebut adalah merupakan Beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Beban perjalanan dinas di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan TA. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan khususnya dalam perjalanan dinas paket meeting dalam kota karena banyaknya kegiatan yang diadakan seperti pelatihan, pendidikan, kunjungan dan lainnya yang pada tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tabel 40  
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 1.852.191.159,00	Rp 1.398.595.133,00	32,43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp -	Rp -	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 643.050.000,00	Rp 3.500.000,00	18.272,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 204.310.000,00	Rp 852.400.000,00	(76,03)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.699.551.159,00</b>	<b>Rp 2.254.495.133,00</b>	<b>19,74</b>

Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat Rp0,00

#### D.7 Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan Beban Pemerintah dalam bentuk Barang dan Jasa kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan Instansi dalam hal meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai Akuntansi Berbasis Akrual.

Tabel 41  
Rincian Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
Beban Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
Beban Barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	

Beban Bantuan Sosial  
Rp0,00

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Bantuan Sosial merupakan beban perintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 42  
Rincian Beban Bantuan Sosial

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Pos dan Giro	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Konsultan	Rp -	Rp -	
Beban Jasa Lainnya	Rp -	Rp -	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp1.219.965.986,00

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.219.965.986 00 dan Rp634.139.243,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat Alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat Ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban Penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 43  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 286,587,218,00	Rp 168.945.640,00	(12,71)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 574,671,512,00	Rp 285.839.975,00	0,52
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 313,197,305,00	Rp 156.598.652,00	-
Beban Penyusutan Irigasi	Rp 22,262,051,00	Rp 11.131.026,00	-
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 23,247,900,00	Rp 11.623.950,00	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Rp 1.219.965.986,00</b>	<b>Rp 634.139.243,00</b>	<b>(3,15)</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0,00.

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44  
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih-			
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih-			
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Beban Lain-  
LainRp0,00

#### D.11 Beban Lain-Lain

Jumlah beban lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas belanja lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 45  
Rincian Beban Lain-Lain

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Beban Aset ekstrakomtabel perit dan m	Rp -	Rp -	
Beban aset ekstrakomtabel ged dan ba	Rp -	Rp -	
Beban aset tetap lainnya	Rp -	Rp -	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>

Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional lainnya Rp23.030.412,00.

### D.12 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya terdiri dari beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember r 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 46  
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 19.827.000,00	Rp 900.000,00	-
<b>Jlh Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>Rp 19.827.000,00</b>	<b>Rp 900.000,00</b>	<b>2.103,00</b>
Penerimaan Belanja Pegawai TAYL	Rp 613.500,00	Rp 371.157,00	65,29
Penerimaan Belanja Barang TAYL	Rp 2.589.912,00	Rp 10.202.000,00	(74,61)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp -	Rp 80.364.000,00	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp -	-
<b>Jlh Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>Rp 3.203.412,00</b>	<b>Rp 90.937.157,00</b>	<b>(96,48)</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp -	Rp 3.409.400,00	-
<b>Jlh Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>Rp 3.203.412,00</b>	<b>Rp 87.527.757,00</b>	<b>(96,34)</b>
<b>Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional</b>	<b>Rp 23.030.412,00</b>	<b>Rp 91.837.157,00</b>	<b>(74,92)</b>

### D.13 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa Rp0,00

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi,tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.Rincian pos luar biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 47  
Rincian Pos Luar Biasa

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	Rp -	Rp -	-
Beban perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	-
Beban Persediaan	Rp -	Rp -	-
<b>Jumlah</b>			

## E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### Ekuitas Awal

Rp45.115.990.601,00

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp44.367.937.329,00 dan Rp45.115.990.601,00.

### Defisit LO

Rp(74,217,710,638,00)

### E.2.Surplus (Defisit)LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp(74,217,710,638,00) dan Rp(70.426.548.191,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. Surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

### Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00.

### E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas penyesuaian nilai tahun berjalan. Rincian Penyesuaian Nilai Aset tahun 2023 :

Jenis Aset	Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset	Rp -
	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>

### Selisih Revaluasi Aset

Rp0,00

### E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi atas nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

### Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp0,00.

### E.5. Koreksi Aset Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset  
Tetap/Lainnya Non  
Revaluasi Rp0

### E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp80.364.000,00.

Lain-lain Rp0,00

### E.6. Lain-lain

Koreksi Atas Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan persediaan yang terjadi atas periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp3.409.400,00.

Ekuitas Akhir  
Rp44.367.937.329,00

### E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp44.367.937.329,00 dan Rp45.115.990.601,00.

## F. PENGUNGKAPAN –PENGUNGKAPAN LAINNYA

-Masih terdapat temuan BPK RI pada LK 2021 yang masih belum selesai ditindaklanjuti dengan temuan “Perencanaan, Penatausahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan” yaitu inventarisasi keberadaan aset tetap dan aset lainnya dengan menggunakan geotagging dengan aset senilai Rp10.984.443.245,00. Berkenaan dengan hal tersebut, proses tindak lanjut masih berlangsung dan akan segera diselesaikan secara tuntas.

-Telah dilakukan **Reklas pencatatan Barang Milik Negara dikarenakan kesalahan pencatatan kode barang** (Rincian sudah dijelaskan pada pos neraca bagian Gedung dan Bangunan)

Pada periode 31 Desember 2023 DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah diadakan direvisi sebanyak 14 kali dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal	Keterangan
1	Revisi DIPA 1	13 Feb 2023	Pagu tetap Rp76.302.752.000,00
2	Revisi DIPA 2	14 Apr 2023	Permutakhiran KPA, POK pada (1) anggaran Percontohan Perikanan Budidaya, untuk memenuhi anggaran pada Gelar percontohan mini SFV di PENAS Petani Nelayan ke-16
3	Revisi DIPA 3	29 May 2023	Revisi Penambahan Pagu Rp70.990.00,00 untuk Pemanfaatan PNPB
4	Revisi DIPA 4	31 May 2023	Revisi POK pada anggaran Percontohan Perikanan Budidaya dan Pelatihan Masyarakat KP
5	Revisi DIPA 5	5 Jul 2023	Revisi Perbaikan Rencana Penarikan Dana dan pergeseran detil belanja pegawai
6	Revisi DIPA 6	7 Sep 2023	Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada Belanja Operasional
7	Revisi DIPA 7	6 Oct 2023	Revisi update halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK

No	Uraian	Tanggal	Keterangan
8	Revisi DIPA 8	16 Oct 2023	Revisi perubahan/pergeseran hal pagu tetap dan revisi pemenuhan belanja operasional
9	Revisi DIPA 9	30 Oct 2023	Revisi DJA pergeseran belanja pegawai
10	Revisi DIPA 10	6 Nov 2023	Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja BOP dan honor
11	Revisi DIPA 11	15 Nov 2023	Revisi pergeseran belanja pegawai untuk pemenuhan belanja operasional
12	Revisi DIPA 12	30 Nov 2023	Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja operasional
13	Revisi DIPA 13	8 Dec 2023	Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja operasional
14	Revisi DIPA 14	20 Dec 2023	Revisi pemutakhiran data POK kewenangan KPA pada belanja barang

Medan, 07 Mei 2024

Kepala Balai,



**Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.**

NIP. 19790515 200502 1 001

